

Buruh Sawit Bicara Ekologi: **SERBUSAKA di Kalimantan Selatan**



Penerbit

TURC
TRADE UNION RIGHTS CENTRE

Buruh Sawit Bicara Ekologi:
SERBUSAKA di Kalimantan

Selatan

Penulis:

Yohanna Ullu, Harun Arrasyid, Harwanto Harry, Supyan Noor, Putra Kotabaru, dan Debora Simanullang

ISBN:

ISBN: (PDF)

Editor:

Mida Saragih, Surya Tjandra, Mohamad Setiawan

Penata Letak dan Desain Sampul:

Rio Adhia

Penerbit:

Trade Union Rights Centre (TURC)

Redaksi:

Jl. Komp. Batan No.1, RT.6/RW.7, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Jakarta 12520

Website : www.turc.or.id

Email : info@turc.or.id

Instagram : [@turc_id](https://www.instagram.com/turc_id)

Phone : 021-5744655

Cetakan Pertama, Januari 2026

60 halaman, 18,6 x 25,8 cm

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam
bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
maupun penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Prolog	7
Sajak Puisi, "SERBUSAKA"	10
<i>Yohanna Ullu</i>	
SERBUSAKA Sebagai Sebuah Gerakan di Bumi Kalimantan Selatan	13
<i>Harun Arrasyid</i>	
Peran Strategis SERBUSAKA	19
<i>Harwanto Harry</i>	
Kalimantan Selatan di Persimpangan Pertambangan dan Strategi Keberlanjutan	26
<i>Supyan Noor</i>	
Pengalaman Buruh Menghadapi Cuaca Ekstrim	29
<i>Hasan, Ketua FSP BUN Rajawali</i>	
Ketika Buaya dan Monyet Menjadi "Tetangga": Potret Konflik Manusia dan Satwa di Kalimantan Selatan"	34
<i>Putra Kotabaru</i>	

Sungai Mati, Harapan Pun Surut: Derita Nelayan dan Petani Tambak Pamukan.....	39
<i>Putra Kotabaru</i>	
Buruh Perempuan dan Nyala Harapan	43
<i>Yohanna ullu</i>	
Dari Kebun ke Kelas: Melangkah Raih Ilmu, Menangkan Keterbatasan	46
<i>Debora Simanullang</i>	
Epilog, Refleksi Kolektif.....	51

Kata Pengantar

Surya Tjandra - Trade Union Rights Centre

Judul buku ini, “Buruh Sawit Bicara Ekologi”, sudah dipilih sebetulnya jauh sebelum bencana ekologi banjir dan tanah longsor di Sumatera terjadi di bulan Desember 2025 ini. Kita tahu bahwa bencana ini akan terjadi, tetapi kita tidak mengira akan terjadi secepat ini, dan sedemikian besar dampak yang dialami rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor paling dahsyat yang tercatat dalam sejarah mereka.

Banyak analisis menunjukkan bahwa penyebab utama bencana ini adalah deforestasi besar-besaran dan serampangan dimana hutan Sumatera berkurang lebih 66 persen dalam 40 tahun terakhir ini, dari 15 juta hektar menjadi 5 juta hektar pada tahun 2024. Dan hutan-hutan ini rata-rata digantikan oleh perkebunan sawit! Bencana ini sekaligus membantah klaim bahwa perkebunan sawit bisa menggantikan hutan “karena sama-sama pohon..

Hingga saat tulisan ini dibuat jumlah korban di Sumatera telah mencapai 712 orang tewas, 507 orang hilang, 2600 orang terluka dan satu juta orang mengungsi. Sementara seperti dilansir CELIOS (Center of Economic and Law Studies), kerugian ekonomi akibat bencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatera diperkirakan mencapai Rp 68,67 triliun atau sekitar 0,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. CELIOS menduga kerugian tersebut akan meluas, bukan hanya dirasakan di area yang terdampak langsung karena putusnya rantai pasok dan distribusi barang antar-wilayah, sehingga aktivitas ekonomi di banyak provinsi juga ikut terganggu.

Laporan dari lapangan termasuk yang berseliweran di media sosial menunjukkan parahnya situasi, dan bagaimana respon negara yang amat tidak empatik [seperti kampanye “Presiden seumur hidup” untuk Prabowo oleh seorang Bupati; atau melempar bantuan pangan dari helikopter yang membuatnya tidak bisa dikonsumsi karena rusak begitu menyentuh tanah; seorang Menteri yang dinilai pencitraan semata dengan memanggul beras saat kunjungan padahal orang yang sama diketahui publik adalah pemberi konsesi pelepasan hutan paling besar di jabatan sebelumnya; dll].

Semua ini menunjukkan kegagalan Pemerintah merespon situasi bencana seperti ini: di satu sisi harus merespon tuntutan publik karena begitu masifnya dampak bencana, di sisi lain seperti dibayang-bayangi kesalahan masa lalu yang sebagian dilakukan justeru oleh mereka yang masih menjabat pada hari ini. Semua perilaku menyakitkan justeru dilakukan oleh para pejabat sendiri yang seharusnya lebih punya empati.

Lalu bagaimana buruh sawit sendiri merespon situasi ini?

Dari percakapan dengan beberapa pegiat buruh sawit terasa mereka menunjukkan rasa bersalah mencermati apa yang terjadi di Sumatera tersebut. Tentu bagi mereka ini adalah pekerjaan dan lapangan kerja yang telah menghidupi dirinya dan keluarganya sekian lama, beberapa bahkan sejak beberapa generasi di atasnya. “Memang ada dampak lingkungan dari perkebunan sawit yang kami rasakan, seperti banjir rutin, tetapi tidak pernah seperti yang kami lihat terjadi di Sumatera,” ucap seorang aktivis buruh sawit di Kalimantan. “Sekarang kami hanya bisa menggalang dana solidaritas, ke depan seharusnya jangan ada lagi pembukaan hutan.”

“Tetapi bukan hanya perkebunan sawit yang bertanggung jawab, banyak di daerah kami ada perusahaan pertambangan dan plywood yang banyak yang membuka hutan,” imbuhnya lagi. “Sekarang masyarakat hampir tidak mungkin bisa membuka hutan, hanya perusahaan yang mampu.” Yang dimaksud olehnya adalah bahwa untuk membuka hutan sesungguhnya sudah tidak mudah lagi dilakukan, hanya dengan izin dari Pemerintah [pusat] yang didukung oleh modal yang amat kuat.

Penjelasan singkat buruh sawit di atas sesungguhnya menunjukkan kepedulian dari buruh sawit sendiri terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perkebunan sawit tempat mereka bekerja. Bagaimanapun ini adalah juga pekerjaan mereka yang memberi mereka upah untuk hidup. Banyak dalam kondisi yang masih tidak layak sebetulnya, tetapi tetap sebuah pekerjaan. “Bapi banyak dari kami tidak punya pilihan, kalau ada pekerjaan lebih layak bisa kami dapat tentu kami ambil,” tegas seorang buruh lain yang harus bermigrasi mengikuti keluarganya dari kampung di Nusa Tenggara Timur ke Kalimantan Selatan.

Buruh perkebunan, juga pastinya buruh dari berbagai sektor lain yang punya dampak besar terhadap lingkungan seperti pertambangan atau plywood misalnya, tentu tidak pernah mengharapakan pekerjaan mereka ini menciptakan bencana dan dampak lingkungan sebesar seperti yang terjadi di Sumatera. Tetapi mereka juga tidak berdaya menghadapi tuntutan ekonomi dan lingkungan hidup yang menyertai kerja dan hidupnya sehari-hari sepanjang tahun hingga beberapa generasi. Pada konteks ini tampak ada pembelahan sistemik antara hukum perburuhan di satu sisi dan hukum lingkungan di sisi lain.

Kapitalisme industri membuat tenaga kerja berada di bawah kendali modal, sehingga terjadi pemisahan dan dominasi. Karena tenaga kerja dan sumber daya alam dianggap sebagai biaya produksi, upaya untuk mengurangi sifat komoditasnya melalui aturan yang tidak terkoordinasi justru memperkuat pemisahan ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kurangnya koordinasi antara hukum perburuhan dan hukum lingkungan bisa menyebabkan biaya regulasi dialihkan ke salah satu pihak, sehingga tenaga kerja dan lingkungan seolah bersaing satu sama lain (Tomassetti dan Bugada, 2022).

Meski banyak yang membahas hubungan antara hukum perburuhan dan hukum lingkungan, kajian mendalam tentang bagaimana keduanya saling terkait masih jarang dilakukan. Padahal penting untuk tahu apakah aturan-aturan ini saling mendukung atau justru bertentangan. Salah satu penelitian menarik dilakukan oleh Blaise dan Ibrahim (2019) di Kanada. Mereka meneliti apa yang disebut “hak lingkungan buruh” [“workers’ environmental rights”] dalam aturan keselamatan kerja dan hukum lingkungan. Secara sederhana, hak lingkungan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan. Dan hak lingkungan buruh berarti hak-hak tersebut berlaku di tempat kerja dan bisa dimanfaatkan oleh para buruh.

Studi tentang “hak lingkungan buruh” berangkat dari pandangan bahwa keberlanjutan harus menjadi syarat utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Konsep pembangunan berkelanjutan memang sering diperdebatkan dan punya banyak tafsir, tapi penting menekankan perlunya aturan dan lembaga yang mendorong kerja sama antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan kebijakan eko-sosial, yaitu kebijakan publik yang secara sengaja menggabungkan perlindungan lingkungan hidup dengan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, kita bisa mendorong keberlanjutan tanpa terjebak pada pola lama yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Tentu ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Di sini seharusnya Negara hadir menata lingkungan hidup dan pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dsb, tidak hanya bisa membuka peluang kerja tetapi juga menjamin hak yang layak sambil tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sesungguhnya ini bisa dilakukan kalau saja penyelenggaranya sendiri memang bersih.

Bencana banjir dan tanah longsor sebesar yang terjadi di Sumatera bukan peristiwa tiba-tiba, melainkan hasil puluhan tahun pembukaan hutan secara serampangan untuk digantikan perkebunan dan pertambangan, dengan dalih untuk pembangunan. Kegagalan Pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional tampaknya menunjukkan kegagalan Pemerintah sendiri menghadapi keterlanjutan kebijakan di masa lampau, dengan kewajiban dan mimpi untuk mewujudkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik di masa kini dan masa depan.

Aktivis lingkungan hidup sudah lama mengingatkan potensi bencana tetapi tidak membuat Pemerintah berubah, hingga akhirnya apa yang dikhawatirkan sungguh terjadi. Pada titik ini korban paling banyak adalah rakyat kecil, buruh perkebunan, tambang, yang menggantungkan hidupnya di sana.

Bencana banjir dan tanah longsor Sumatera ini seharusnya menjadi “wake-up call” betapa urgensinya menjaga lingkungan dan pekerjaan secara berkelanjutan.

Buku kecil karya para pegiat buruh sawit Kalimantan Selatan yang tergabung dalam SERBUSAKA ini tampaknya ingin memberi kontribusi kecil dari mimpi dan ikhtiar besar di atas, sebagai catatan dan refleksi dari buruh sendiri melihat dirinya, lingkungannya, dan masyarakatnya, serta keterkaitannya satu sama lain. Mereka dengan segala keterbatasan ingin mendukung pembangunan yang berkelanjutan; yang bagi sebagian besar penyelenggara negara hanya jadi jargon kosong, bagi mereka itu adalah juga pertarungan hidup dan mati dirinya, dan keluarganya.

“Buruh Sawit Bicara Ekologi” [ekologi, berasal dari Bahasa Yunani “oikos”, artinya “rumah, tempat tinggal”, dan “logos”, artinya “pembelajaran”] adalah sebuah wasiat keberlanjutan versi buruh perkebunan sawit untuk kita semua yang masih peduli, tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak buruh perkebunan sawit sambil menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutannya. Seperti dikatakan ahli biologi Jerman Ernst Haeckel pada 1866, ekologi dapat diartikan secara harfiah sebagai “pembelajaran tentang rumah”, mengacu pada bagaimana organisme terkait satu sama lain dalam lingkungan mereka. “Buruh Sawit Bicara Ekologi” adalah wasiat tentang rumah mereka, tentang keterkaitan dari seluruh organisme di dalamnya yang tidak hanya manusia. Ini adalah wasiat keberlanjutan untuk kita semua, tetapi terutama wasiat bagi buruh sawit sendiri selaku salah satu penghuni di perkebunan.

Selamat terus berjuang dalam kebersamaan, SERBUSAKA!

Jakarta, 4 Desember 2025

Prolog

Mida Saragih - Editor

Para pembaca budiman, buku dengan tajuk “Buruh Sawit Bicara Ekologi: SERBUSAKA di Kalimantan Selatan” ini

lahir dari kerja bersama para buruh sawit yang setiap hari berhadapan dengan ketidakadilan—baik dalam pekerjaan maupun dalam keseharian mereka. Buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan, melainkan dokumentasi pengalaman dan ingatan kolektif buruh sawit yang selama ini jarang mendapat ruang untuk didengar.

Sejak berdiri pada tahun 2016, SERBUSAKA (Serikat Buruh Sawit Kalimantan) menjadi wadah harapan dan perjuangan. Ia menyatukan berbagai serikat buruh sawit untuk memperjuangkan hak-hak dasar buruh sekaligus mendorong perubahan yang lebih adil dalam industri sawit—sebuah industri yang selama ini tumbuh di atas ketimpangan sosial, ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Dengan dukungan Trade Union Right Center (TURC), buku ini disusun sebagai upaya advokasi dan edukasi, agar kisah buruh sawit tidak berhenti di lingkaran mereka sendiri, tetapi menjangkau publik yang lebih luas.

Melalui tulisan-tulisan dalam buku ini, para penulis ingin menegaskan satu hal penting: persoalan buruh tidak bisa dipisahkan dari krisis ekologis. Buruh sawit—banyak di antaranya adalah perempuan—melakukan pekerjaan fisik berisiko tinggi, seperti penyemprotan pestisida, yang berdampak langsung pada kesehatan tubuh mereka sekaligus pada lingkungan. Belum lagi penyusutan kawasan hutan yang secara drastis mengurangi habitat alami berbagai jenis fauna dan flora. Aktivitas perkebunan monokultur seperti sawit, alih fungsi kawasan hutan yang mengakibatkan deforestasi, industri ekstraktif meninggalkan jejak kerusakan yang merupakan akumulasi aktivitas manusia, yang menjadi kekuatan utama yang mengubah bumi yang mengantarkan kita pada era baru bernama antroposen.

Pada 2002, melalui artikel "The Geology of Mankind" di jurnal *Nature*, Paul Crutzen—peraih Nobel Kimia berkat karyanya tentang lubang ozon—memperkenalkan konsep "Antroposen" untuk menamai epoch geologi saat ini (Crutzen, 2002). Antroposen menandakan periode baru dalam sejarah bumi di mana dominasi manusia atas alam mengakibatkan kerusakan signifikan yang mengubah lanskap alam.

Moore (2015) mengungkapkan bahwa penyebabnya adalah bukan manusia, melainkan sistem kapitalisme yang menempatkan tenaga kerja, pangan, energi dan bahan mentah—sebagai *cheap nature*. Kapitalisme menguntungkan segelintir individu yang mengakumulasi kekayaan dengan menciptakan krisis dan ketidakadilan—yang diungkapkan sebagai *capitalocene*. Sebelumnya, Marx dalam *Kritik Program Ghota* (1875) menyebutkan alam sebagai sumber nilai walaupun tidak banyak dielaborasi, "Kerja bukanlah satu-satunya sumber seluruh kekayaan.

Alam juga merupakan sumber nilai layaknya kerja.” Dari dua pandangan tersebut, terdapat garis lurus di mana kapitalisme tidak saja mengolah tenaga kerja, melainkan juga memanfaatkan alam dengan membayar sedikit atau pun tanpa membayarnya, demi meningkatkan daya produktif dan meraih nilai tambah. Tujuannya untuk mengejar keuntungan dan produktivitas tanpa batas.

Industri sawit adalah contoh nyata bagaimana pergerakan dan ekspansi kapital menciptakan akumulasi bencana ekologis. Di Kalimantan Selatan, bencana ekologis terasa sangat nyata. Hutan tropis dan rawa yang dulu menjadi ruang hidup kini berubah menjadi hamparan perkebunan sawit yang seragam. Wilayah ini kian rentan dengan adanya deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, emisi karbon, hingga banjir dan longsor akibat perubahan lanskap alam.

Sistem kapitalisme banyak diuntungkan oleh sistem patriarki yang mengatur-atur tubuh dan pengetahuan. Kaum perempuan dan kelompok rentan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja dengan memperkuat hirarki gender; memperkuat diskriminasi dan marginalisasi tenaga kerja lewat upah rendah, minimnya perlindungan sosial dan keselamatan kerja; hingga industrialisasi yang menormalisasi fleksibilitas tenaga kerja. Di saat yang sama, hubungan manusia dengan alam semakin terputus. Buruh sawit menjadi saksi sekaligus korban dari kerusakan alam tersebut.

Dalam konteks inilah buku “Buruh Sawit Bicara Ekologi” menjadi penting. Buku ini hendak mengantarkan kita pada perspektif dimana perjuangan memperbaiki kondisi kerja buruh tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui SERBUSAKA, buruh sawit tampil sebagai pembicara penting yang berinisiatif menawarkan jalan perjuangan yang lebih adil dan inklusif—bagi manusia maupun alam. Dengan mendengarkan suara buruh sawit, kita diajak memahami krisis secara lebih utuh: bukan hanya sebagai persoalan ekonomi-politik atau ekologi semata, tetapi sebagai persoalan kemanusiaan.

Semoga buku ini membuka ruang refleksi, empati, dan keberpihakan yang lebih luas. Kami juga berharap buku ini menjadi penyemangat kawan-kawan buruh sawit, khususnya perempuan—untuk kian menyuarakan pengetahuan dan pandangan kritisnya.

Selamat membaca.





Sajak Puisi

“SERBUSAKA”

Yohanna Ullu

Lihatlah!

Di ladang sawit yang terbakar keringat
Di punggung buruh yang diperas habis-habisan
Lahir satu ikrar, satu seruan lantang:
SERBUSAKA!!

Serikat-serikat Buruh Sawit bersatu,
menjahit luka menjadi senjata,
menyatukan langkah di jalan perlawanan.

Di bawah terik matahari,
kami pernah menangis,
upah kecil menindih,
hak dipangkas,
martabat diinjak!
Namun air mata itu,
kami sulap jadi bara
Jadi api yang tak padam!

SERBUSAKA!

Bukan sekadar nama,
tapi janji untuk berdiri tegak,
melawan ketidakadilan yang mengurung.

Kami bukan lagi tubuh-tubuh lemah,
kami adalah gelombang,
ombak yang menyapu rakusnya penguasa.

Dengarlah!
Kami tak gentar!
Sekali langkah kami rapat,
seribu tangan menggenggam erat,
sejuta suara menyeru:
"Keadilan!
Hak!
Martabat!"

Dan bila jalan terjal menghadang,
kami akan mendakinya bersama.
Bila penjara menanti,
kami tahu,
tak ada jeruji yang bisa merantai semangat ini.

SERBUSAKA!

Satu aliansi,
satu nafas,
satu perlawanan.

Kami bangkit bukan untuk diri,
tapi untuk semua buruh
untuk tanah yang subur dengan keadilan,
untuk langit yang bebas dari penindasan.

Dengarkan sumpah kami:
Kami takkan menyerah!
Kami takkan runtuh!

Selama buruh masih bernafas,
SERBUSAKA akan terus maju!

Hidup Buruh!

Hidup Buruh!

Hidup Buruh!



SERBUSAKA

Sebagai Sebuah Gerakan di Bumi Kalimantan Selatan

Harun Arrasyid



Gerakan SERBUSAKA bermula sekitar akhir tahun 2016
embrio perkumpulan gerakan buruh sawit mulai terbentuk pada saat menuntut Upah Minimum di Kabupaten kotabaru di kala itu, mencakup diantaranya perkumpulan dari beberapa federasi serikat buruh dan PUK yang mewakili 3 korporasi besar di Kalimantan Selatan khususnya Kota Baru



yaitu Sinarmas, Minamas, dan Eagle High Plantation, selain daripada tuntutan upah gerakan ini juga merasakan berbagai ketidakadilan dan permasalahan di perburuhan industri kelapa sawit. Sehingga, gerakan ini berlanjut dalam beberapa kegiatan pendidikan perburuhan yang diadakan di Rumah Perjuangan saat itu, dengan konsentrasi melatih buruh untuk melakukan advokasi dalam setiap isu yang mereka hadapi.

Rumah perjuangan ini hanyalah sebuah rumah kecil sederhana di Desa Cantung, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Dalam rumah perjuangan yang kecil itu, berlangsung diskusi intensif dan kelas advokasi yang difasilitasi oleh lembaga pemberdayaan masyarakat, Trade Union Right Center (TURC), yang fokus pada advokasi perburuhan.

Diskusi-diskusi di Rumah Perjuangan itu mengangkat banyak persoalan utama yang dialami oleh buruh sawit dan di mana sebagian dari mereka sudah menjadi anggota serikat pekerja sawit dari

berbagai federasi yang tergabung secara intens pada waktu itu, seperti Federasi Serikat Pekerja Minamas Area Sungai Durian, Federasi Serikat Pekerja Minamas Area Pamukan, DPC Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-SPSI, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan EHP, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri Sinarmas Kalimantan Selatan. Kesamaan pengalaman dan permasalahan di antara buruh sawit menjadi pondasi lahirnya gerakan aliansi Serikat Buruh Sawit Kalimantan Selatan yang kemudian dikenal dengan SERBUSAKA.

Beberapa faktor yang melahirkan gerakan SERBUSAKA berakar dari berbagai kondisi berat yang dialami oleh buruh sawit. Banyak buruh menerima upah yang jauh di bawah standar layak, bahkan di bawah upah minimum, dengan alasan yang sering tidak realistis seperti target kerja yang sangat tinggi dan ketat. Selain itu, sistem sanksi yang diterapkan sering tidak adil, misalnya denda besar yang dikenakan atas kesalahan kecil seperti memanen buah yang tidak sesuai standar perusahaan, sementara premi penghargaan untuk hasil panen yang baik jauh lebih kecil. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang sangat menyiksa buruh.

Beban kerja yang berat juga menjadi faktor besar, terutama bagi buruh perempuan yang bertugas di bagian pemupukan dan penyemprotan, di mana mereka harus memenuhi target berat dan kuantitas pekerjaan yang melelahkan dan kadang berisiko bagi kesehatan akibat kontak dengan bahan kimia. Status kerja yang tidak jelas antara buruh kontrak dan permanen menjadi masalah pelik yang sulit diatasi karena multitafsir regulasi dan minimnya pengawasan dari pemerintah.

Sementara, regulasi yang ada selama ini lebih banyak mengacu pada industri manufaktur dan belum secara spesifik dan memadai mengatur perlindungan bagi buruh di industri sawit, sehingga buruh rentan terhadap diskriminasi dan intimidasi.

Banyak perusahaan juga tidak taat pada kewajibannya untuk mendaftarkan buruh dan keluarganya ke dalam program jaminan sosial kesehatan sehingga membuat buruh sulit mendapatkan pelayanan kesehatan saat sakit, bahkan sebagian buruh mereka mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak secara penuh atas semua program yang seharusnya bisa mereka terima sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), sehingga mereka kehilangan Hak mereka untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Hambatan dalam kebebasan berserikat semakin menambah beban perjuangan buruh, di mana buruh sering diintimidasi, dipindahkan jauh dari lokasi kerja, bahkan dipecat hanya karena aktif mengurus serikat pekerja. Semua faktor ini bersatu mendorong lahirnya gerakan SERBUSAKA sebagai upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan perlindungan yang layak bagi buruh sawit dengan membentuk suatu perkumpulan bersama dan bersepakat menyatakan menjadi Aliansi SERBUSAKA pada Akhir 2020.

Saat pertama kali melakukan silaturahmi kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, SERBUSAKA menyampaikan dinamika masalah buruh di industri sawit dan

kami mendorong saat itu agar DPRD Kalsel bisa melahirkan regulasi khusus di industri sawit. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 Desember 2020, dengan memakai seragam dan atribut logo Aliansi SERBUSAKA untuk pertama kalinya Gerakan SERBUSAKA memiliki cita-cita mulia untuk menciptakan kondisi kerja yang adil dan bermartabat bagi seluruh buruh sawit.

Mereka bertekad menuntut upah yang layak sesuai kebutuhan hidup buruh dan keluarganya, tanpa diberatkan oleh sanksi tidak adil. Selain itu, gerakan SERBUSAKA ingin mengurangi dan mengelola beban kerja agar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusiawi buruh, sehingga tidak memberatkan secara fisik maupun mental.

SERBUSAKA juga menegaskan pentingnya status kerja yang jelas, khususnya perlindungan bagi buruh kontrak, dan mengupayakan agar mereka dapat diangkat menjadi pekerja dengan status lebih aman dan permanen.

Gerakan ini berupaya keras untuk mendorong terciptanya regulasi ketenagakerjaan yang khusus dan memadai bagi industri sawit, yang benar-benar memahami karakteristik dan risiko unik pekerjaan di perkebunan sawit. Selain itu, SERBUSAKA menuntut kepatuhan pengusaha terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, agar buruh dan keluarganya mendapat perlindungan yang sepatutnya.

Kebebasan berserikat dan hak berorganisasi buruh tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi juga menjadi salah satu fondasi perjuangan mereka.

Untuk menjamin keberlanjutan perjuangan ini, gerakan SERBUSAKA turut mengangkat kesadaran dan kapasitas buruh melalui pendidikan dan advokasi agar mereka mampu memperjuangkan hak-haknya dengan pengetahuan yang cukup dan strategi yang tepat. Cita-cita ini merupakan wujud komitmen untuk membawa perubahan positif dan keberlanjutan kesejahteraan buruh sawit di masa depan.

Gerakan SERBUSAKA tumbuh dari kesadaran kolektif buruh sawit yang ingin keluar dari kondisi kerja yang menindas dan penuh ketimpangan. Dengan tekad kebersamaan dan dukungan edukasi, perjuangan buruh dalam SERBUSAKA berharap ke depannya perubahan positif yang nyata kepada kehidupan buruh sawit di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, menciptakan masa depan yang lebih adil dan manusiawi untuk seluruh pekerja perkebunan sawit. (*)





Peran Strategis Aliansi SERBUSAKA

Harwanto Harry

Pernah membayangkan bagaimana awal mula buruh sawit di Kalimantan Selatan bersatu demi perubahan? Semua dimulai dari semangat pekerja di kebun, pabrik, hingga pengolahan sawit yang mendirikan dan bergabung ke dalam serikat—tempat mereka berbagi cerita, harapan, dan perjuangan. Tapi seiring waktu, masalah yang mereka hadapi jauh dari sederhana. Perlakuan tidak adil terhadap buruh, diskriminasi, aturan ketenagakerjaan yang diartikan sesuka hati oleh tiap manajemen, hingga hak-hak yang semestinya setara malah jadi bahan tawar-menawar.

Perlakuan perusahaan yang tidak adil ini bukan sekedar angka atau persoalan administratif. Ini adalah luka batin yang terus menumpuk, sebuah ketidakadilan yang dirasakan sampai ke relung hati. Buruh sawit itu hanyalah manusia biasa yang ingin

dihargai dan diperlakukan dengan martabat. Setiap perlakuan berbeda itu bukan hanya soal kerja, tapi soal harga diri dan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Gerakan buruh sawit di Kalimantan Selatan bermula dari berdirinya serikat-serikat pekerja di berbagai perusahaan sawit, mulai dari kebun, pabrik pengolahan, hingga fasilitas pengolahan lanjutan. Seiring berjalannya waktu, masalah perburuhan di industri sawit menjadi semakin rumit, lintas kebun dan bahkan lintas PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Inilah yang memacu para buruh Kalimantan Selatan bersatu. Beberapa serikat dalam satu grup perusahaan menggabungkan diri ke dalam organisasi federasi membentuk sebuah ikatan kuat—Aliansi SERBUSAKA. Dengan bergabung, mereka bisa saling menguatkan dan bersinergi dalam memperjuangkan kepentingan buruh sawit secara bersama-sama, sehingga suara mereka bisa lebih berdaya dalam advokasi perbaikan kondisi kerja. Narasi para buruh ini adalah panggilan nyata, sebuah seruan untuk perubahan yang tak bisa diabaikan oleh siapapun.

Industri sawit yang terus berkembang di Kalimantan Selatan ternyata membawa berbagai masalah rumit bagi para buruhnya. Salah satu penyebabnya adalah persepsi manajemen lokal yang berbeda dalam menjalankan aturan ketenagakerjaan. Akibatnya, buruh yang melakukan pekerjaan sama seringkali diperlakukan secara berbeda—baik soal status kerja, beban kerja, maupun jaminan perlindungan dan hak-hak lainnya. Perbedaan perlakuan yang begitu besar ini membuat beberapa federasi serikat buruh yang berada dalam satu grup perusahaan merasa perlu bersatu lebih kuat. Maka, lahirlah Aliansi SERBUSAKA.

sebuah wadah yang mengumpulkan berbagai federasi serikat buruh di Kalimantan Selatan. Dengan bersinergi, mereka dapat memperjuangkan hak-hak buruh sawit secara lebih efektif dan memastikan suara mereka didengar oleh perusahaan maupun pemerintah demi keadilan dan perlindungan bersama.

Industri sawit di Kalimantan Selatan belum mampu mengedepankan kepastian kerja dan masih bermain dalam definisi yang samar terkait perbedaan pekerjaan inti dan pekerjaan pendukung, terutama di sektor kebun. Akibatnya, buruh yang mengerjakan tugas serupa sering kali tidak punya status kerja yang jelas. Ini membuat mereka yang bekerja seberat-beratnya menerima perlakuan dan hak yang berbeda-beda. Idealnya, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bisa jadi pegangan tetap antara serikat buruh dan manajemen. Namun selama ini PKB yang ada masih terbatas pada masing-masing lokasi kerja, sehingga tidak bisa jadi solusi menyeluruh.

Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang tampaknya dapat dilakukan adalah adanya Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK) dan Upah Minimum Sektor Perkebunan/Sawit (UMSP/UMSK) sebagai jaring pengaman agar buruh sawit mendapat pengupahan yang layak. Aliansi SERBUSAKA telah bekerja keras memperjuangkan upah, dan pada tahun 2025 berhasil mendorong bergulirnya UMSP/UMSK sektor sawit di Kalimantan Selatan. Ini adalah kemenangan penting yang harus terus dikawal agar nilai upah dan kualitas pengupahan buruh sawit bisa naik dari waktu ke waktu.

Dalam memberikan perlindungan dan jaminan pekerjaan yang layak bagi buruh sawit, peran Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya menjadi yang terdepan. Industri sawit adalah urat nadi ekonomi daerah, namun sayangnya Pemda masih terlihat kurang memahami peran dan kewenangan yang dimilikinya untuk berperan aktif dalam memperbaiki tata kelola industri ini, khususnya dalam hal perlindungan buruh.

Saat ini, fungsi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) masih terbatas pada pencatatan organisasi serikat buruh dan memberikan saran penyelesaian sengketa. Pengawasan yang dilakukan pun hanya sebatas monitoring aduan saja, tanpa memastikan pihak-pihak terkait benar-benar mematuhi aturan yang berlaku.

Di sinilah peran strategis Aliansi SERBUSAKA sangat penting. Aliansi terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah konkret dengan membuat regulasi daerah (Perda) yang mengatur perlindungan buruh sawit. Dengan regulasi ini, sektor perburuhan dalam investasi sawit bisa benar-benar memberikan kepastian kerja, perlindungan hak, dan akhirnya mewujudkan kesejahteraan buruh, yang sekaligus menjadi tulang punggung penggerak ekonomi daerah.

Slogan sawit berkelanjutan membawa harapan besar bagi buruh, bahwa industri ini benar-benar bisa memberikan kesejahteraan. Namun implementasi sawit berkelanjutan harus lebih dari sekadar memenuhi standar dan sertifikasi. Yang terutama adalah menciptakan kondisi kerja di mana buruh menjadi pusat perhatian—mendapat upah layak, perlindungan sosial, dan lingkungan kerja yang aman.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan hanya kewajiban, tapi investasi penting untuk produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Pengawasan dan penerapan standar K3 harus terus dijalankan agar semua pihak taat aturan. Indikator nyata adalah terciptanya kondisi kerja yang layak serta tata kelola penyelesaian masalah kecelakaan atau gangguan kesehatan.

Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) juga wajib jadi perhatian serius. Karena lokasi perkebunan sawit yang luas dan terpencil rawan terjadinya pelanggaran, terutama terhadap buruh perempuan. Sayangnya, kasus TPKS sering dianggap masalah internal perusahaan dan tidak ditangani serius, padahal dampaknya sangat merusak kehidupan korban. Diskriminasi perempuan buruh, terutama soal hak-hak maternitas, juga masih terjadi di lapangan.

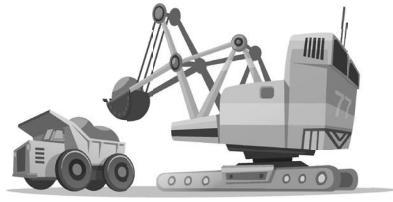
Karena itu, kerja keras advokasi dalam hal perlindungan K3, gender, pencegahan TPKS, dan jaminan sosial harus terus diperkuat agar buruh sawit bisa bekerja di lingkungan yang benar-benar aman, adil, dan bermartabat. Aliansi SERBUSAKA lahir sebagai jawaban atas persoalan kompleks yang dihadapi buruh sawit di Kalimantan Selatan, terutama terkait perbedaan perlakuan dan tata kelola antar perusahaan sawit. Aliansi ini berupaya menjadi wadah advokasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di industri sawit agar tercipta sinergi dan komitmen bersama, demi tata kelola yang lebih baik lagi.

Aliansi SERBUSAKA juga mendorong agar regulator dan legislatif menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara maksimal, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Saat ini, Aliansi masih beroperasi secara komitmen bersama tanpa status organisasi formal, namun mengingat harapan besar dari para buruh sawit khususnya dalam menjalankan berbagai kegiatan advokasi, penting bagi Aliansi untuk segera membentuk struktur organisasi yang formal.

Dengan perangkat organisasi yang kuat, Aliansi SERBUSAKA dapat terus mengembangkan gerakannya, menyusun strategi advokasi, serta memperluas jejaring dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah mendukung terbentuknya tata kelola industri sawit berkelanjutan yang benar-benar berpihak pada buruh, khususnya di Kalimantan Selatan, serta mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan buruh yang lebih baik.

Aliansi SERBUSAKA dibentuk karena kepentingan bersama para buruh sawit untuk mengatasi berbagai masalah yang kompleks di sektor sawit, terutama terkait perlakuan berbeda dan tata kelola yang tidak seragam antar perusahaan di Kalimantan Selatan. Aliansi ini hadir sebagai wadah advokasi yang melibatkan banyak pihak agar ada sinergi dan komitmen untuk memperbaiki tata kelola industri sawit, sekaligus mendorong regulator dan legislator menjalankan peran pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Saat ini Aliansi SERBUSAKA beroperasi berdasarkan komitmen bersama tanpa pendirian organisasi formal. Namun, mengingat besarnya harapan agar Aliansi ini menjadi representasi resmi dan wadah pemersatu buruh sawit di Kalimantan Selatan, perlu dibahas lebih lanjut serta penguatan untuk menjadikan Aliansi sebagai organisasi formal. Dengan organisasi yang kuat, Aliansi bisa terus mengembangkan gerakan, mengorganisir advokasi, dan memperluas jejaring dengan berbagai pihak lainnya guna mewujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan yang benar-benar adil dan menguntungkan buruh sawit. (*)



Kalimantan Selatan

Pada Persimpangan Pertambangan dan Strategi Keberlanjutan

Supyan Noor

Perjalanan pulang ke Kotabaru melalui Banjarmasin, terutama melewati Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, kini tak lagi semulus yang diharapkan. Daerah yang dikenal kaya akan sumber daya tambang batu bara ini membawa konsekuensi besar bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal.

Jalan nasional yang menghubungkan berbagai kota strategis di Kalimantan Selatan mengalami kerusakan parah akibat tambang yang beroperasi sangat dekat dengan jalur tersebut. Lubang tambang yang hanya berjarak puluhan meter dari jalan menyebabkan retakan dan longsor, bahkan membuat sebagian jalan terputus dan tidak dapat dilalui. Pemerintah pun harus menggeser jalur jalan untuk memberikan akses alternatif.

Peralihan jalan ini menimbulkan kemacetan panjang karena sistem buka-tutup pengaturan lalu lintas. Antrian kendaraan tak

hanya mobil pribadi, tapi juga truk pengangkut logistik penting, seperti bahan makanan, alat pabrik, hingga truk pengangkut CPO (*crude palm oil*) yang mengirim minyak sawit ke pabrik besar di Tarjun. Kondisi ini menghambat distribusi barang dan berimbas pada produktivitas industri lokal.

Tak hanya jalan, rumah-rumah warga di sekitar tambang juga mengalami dampak serius. Sekitar 23 rumah di Kecamatan Satui mengalami retak pada dinding dan tembok akibat getaran dan aktivitas blasting tambang yang sangat dekat, hanya berjarak 30 sampai 50 meter. Warga pernah meminta ganti rugi dan penyelesaian atas kerugian yang mereka alami, namun prosesnya rumit dan lambat.

Kawasan Satui yang terletak di pinggiran Desa Sungai Danau juga rentan banjir. Eksploitasi lahan pertambangan menyebabkan erosi dan pendangkalan sungai sehingga saat hujan deras dan pasang air laut, air sungai meluap hingga merendam ratusan rumah warga. Banjir ini memaksa warga mengungsi dan menghentikan aktivitas sekolah serta pekerjaan, menambah beban sosial yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintahan setempat. WALHI Kalimantan Selatan menyebut banjir ini sebagai sinyal krisis ekologis akibat aktivitas tambang terbuka yang masif.

Dampak dari gangguan lalu lintas dan bencana ekologis bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga kerugian ekonomi. Logistik yang terlambat memperlambat produksi pabrik di Tanah Bumbu dan Kotabaru, serta menimbulkan kenaikan biaya distribusi barang penting. Secara sosial, kerusakan rumah dan banjir menimbulkan ketidakpastian kehidupan serta menimbulkan

tuntutan ganti rugi yang belum tuntas—mengancam kelangsungan komunitas di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah telah berupaya memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan merelokasi beberapa titik jalan nasional. Namun, pembenahan ini harus berjalan beriringan dengan regulasi ketat terhadap aktivitas pertambangan agar mitigasi dampak dapat dilakukan secara menyeluruh. Pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya terbarukan mulai didorong untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap tambang batu bara yang cadangannya diperkirakan akan habis dalam beberapa dekade ke depan.

Kalimantan Selatan kini berada di persimpangan antara kemajuan ekonomi melalui pertambangan dan tanggung jawab menjaga lingkungan serta kesejahteraan masyarakatnya. Pada akhirnya, keputusan-keputusan strategis harus diambil demi masa depan yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan kualitas hidup warga dan kelestarian alam. (*)



Pengalaman Buruh Menghadapi Cuaca Ekstrim

Hasan, Ketua FSPBUN Rajawali



Perubahan iklim membawa konsekuensi nyata terhadap sektor perkebunan kelapa sawit, tidak hanya pada produktivitas tanaman tetapi juga pada kondisi kerja buruh. Artikel ini mengkaji pengalaman buruh sawit dalam menghadapi cuaca ekstrem

mulai dari peristiwa banjir hingga suhu tinggi di kebun sekaligus menelaah bagaimana perubahan iklim memperburuk kerentanan kerja, terutama di kalangan buruh perempuan. Selain itu, tulisan ini menyoroti ketidaksesuaian standar Alat Pelindung Diri (APD) dalam konteks iklim tropis dan implikasinya terhadap keselamatan serta kesehatan kerja. Dengan pendekatan ketenagakerjaan dan keadilan iklim, artikel ini menawarkan sejumlah opsi kebijakan bagi perusahaan, pemerintah, dan serikat buruh.

Perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir telah memodifikasi pola cuaca di wilayah perkebunan sawit dan menciptakan gangguan sistemik terhadap dinamika produksi. Pada periode curah hujan tinggi, banjir semakin sering terjadi terutama di area perkebunan yang letaknya cekung atau memiliki sistem drainase yang buruk. Kondisi ini menghambat mobilitas buruh menuju areal panen, memperlambat kerja, dan pada banyak kasus membuat pemanen tidak dapat menjalankan tugasnya.

Genangan yang berlangsung lama juga mempengaruhi kesehatan tanaman; akar rentan membusuk dan produktivitas menurun. Sebaliknya, pada musim kering atau gelombang panas, tanaman sawit mengalami stres fisiologis yang berdampak pada penyusutan ukuran dan penurunan kualitas Tandan Buah Segar. Di tengah produksi yang menurun, target tonase harian buruh sering kali tidak mengalami penyesuaian sehingga beban kerja meningkat secara signifikan. Pemanen harus bekerja lebih lama untuk mencapai angka minimal, sementara volume panen yang fluktuatif membuat pendapatan mereka tidak stabil. Situasi ini menunjukkan

bahwa buruh sawit berada pada posisi paling rentan dalam rantai produksi karena harus menanggung dampak perubahan iklim tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai.

Buruh perempuan menghadapi tekanan tambahan akibat perubahan kondisi cuaca, terutama mereka yang bekerja di bagian perawatan seperti penyemprotan, pemupukan, atau pengumpulan brondolan. Ketika banjir melanda, buruh perempuan tetap dituntut menyelesaikan tugas meski area kerja tergenang dan licin. Risiko terpeleset, terperosok ke lumpur, hingga sengatan hewan meningkat drastis. Banyak buruh perempuan harus bekerja dengan APD yang sudah tidak layak pakai, seperti sepatu bot yang terisi air dan membuat mobilitas melambat. Ketidaktersediaan ruang ganti atau fasilitas sanitasi membuat mereka bekerja dalam kondisi basah selama berjam-jam, meningkatkan risiko infeksi kulit dan gangguan kesehatan reproduksi. Pada saat bersamaan, pekerjaan menyemprot menjadi jauh lebih berbahaya karena banjir membuat residu bahan kimia menyebar tanpa kontrol.



Situasi tersebut memperlihatkan bahwa praktik kerja di perkebunan belum mempertimbangkan risiko iklim maupun kebutuhan spesifik gender. Gelombang panas juga menciptakan tantangan serius bagi buruh sawit. Suhu ekstrem menyebabkan stres panas baik pada tanaman maupun pada pekerja. Pada buruh, stres panas memicu kelelahan yang lebih cepat, pusing, dehidrasi, serta penurunan konsentrasi yang meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Dalam kondisi panas yang berlebihan, banyak buruh terpaksa mengurangi penggunaan APD karena perlindungan yang tersedia terlalu tebal, tidak breathable, dan tidak sesuai dengan suhu tropis.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai standar pengadaan APD di perkebunan: mengapa perusahaan tidak menyediakan APD yang dirancang khusus untuk iklim tropis? Sebagian besar perusahaan masih mengandalkan standar APD generik yang tidak ergonomis untuk kondisi lapangan, sehingga buruh dihadapkan pada dilema antara melindungi diri dari paparan kimia atau menghindari risiko kelelahan akibat panas ekstrem.

Dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, buruh sawit mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup. Banyak pemanen memilih memulai kerja lebih dini sebelum panas meningkat, meski hal ini berarti jam kerja yang semakin panjang. Buruh juga kerap memodifikasi cara kerja dengan mengurangi waktu istirahat demi mengejar target, atau mengambil jalur yang lebih panjang untuk menghindari area banjir demi keselamatan. Tidak jarang penggunaan APD dikurangi agar tubuh dapat beradaptasi dengan suhu tinggi, meski keputusan ini meningkatkan risiko paparan bahan kimia maupun cedera. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa beban adaptasi perubahan iklim lebih banyak dipikul oleh buruh ketimbang

perusahaan yang seharusnya menyediakan sistem perlindungan kerja yang memadai.

Agar buruh sawit dapat bekerja secara aman dan layak di tengah intensitas cuaca ekstrem yang terus meningkat, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme perlindungan. Perusahaan perlu menyediakan APD yang sesuai dengan iklim tropis dan menyesuaikan target kerja serta jam kerja berdasarkan situasi cuaca. Sistem drainase, jalur akses aman, ruang istirahat terlindungi dari panas, dan fasilitas air minum layak merupakan infrastruktur dasar yang harus dipenuhi. Pemerintah harus menyusun standar K3 sektor sawit yang memasukkan variabel risiko iklim serta memperketat pengawasan terhadap penyediaan APD yang sesuai. Serikat buruh dan organisasi seperti KBS memiliki peran strategis dalam mengumpulkan data risiko iklim, memperkuat kapasitas buruh dalam menghadapi stres panas, dan memperjuangkan standar perlindungan adaptif di ruang-ruang dialog industrial seperti P2K3.

Pengalaman buruh sawit menghadapi cuaca ekstrim menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan isu keadilan kerja. Beban perubahan iklim tidak boleh terus ditanggung oleh buruh yang berada pada posisi paling rentan. Perusahaan dan pemerintah harus memastikan bahwa adaptasi iklim dijalankan dengan prinsip perlindungan, kesetaraan, dan keselamatan kerja, agar buruh sawit dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan manusiawi di tengah perubahan cuaca yang semakin tidak menentu.



Ketika Buaya dan Monyet Menjadi “Tetangga”: Potret Konflik Manusia dan Satwa di Kalimantan Selatan”

Putra Kotabaru



(Kredit: Harry)

Spanduk tanda waspada serangan buaya di lokasi sekitar sungai.

Di tepian sungai Kalimantan Selatan, air berkilau menari diterpa sinar pagi. Namun, ketenangan itu menipu. Di balik arus yang tenang, seekor buaya bisa muncul tiba-tiba, mengguncang rasa aman siapa pun yang lengah. Ketegangan antara manusia dan buaya yang dulu jarang terjadi kini kian sering berbuah petaka.

Hutan tropis Nusantara selama ribuan tahun menjadi rumah bagi ribuan satwa liar, laboratorium alami yang menjaga keseimbangan ekosistem. Burung-burung menjadi penyebar biji; kera, rusa, dan ikan hidup dalam rantai makanan; sedangkan buaya sebagai predator puncak mengatur populasi hewan air. Namun, rumah ini kini terancam. Hutan rapat berganti perkebunan sawit yang seragam dan rawa-rawa yang dikeringkan menjadi lahan baru. Sungai-sungai dialihkan demi jalur produksi, sementara suara alam tergantikan deru mesin industri sawit.

Dalam situasi ini, buaya kehilangan rumah, terdesak keluar hingga sering menyusup ke wilayah permukiman dan sungai yang padat aktivitas manusia. Pertemuan manusia dan buaya meningkat, dengan sejumlah kejadian tragis. Pada tahun 2022, Hatinah, seorang karyawan kebun sawit meninggal dunia setelah disambar buaya saat mencuci tangan di parit kebun. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa hanya beberapa puluh meter dari tempat ia menghilang, meninggalkan duka mendalam. Setahun setelahnya, di tahun 2023, tragedi serupa terjadi pada Siti Hamsiah, seorang ibu rumah tangga di Desa Bakau. Saat memperbaiki pipa air di sungai desa, ia diterkam buaya. Empat jam kemudian, jasadnya ditemukan dengan bekas gigitan di pahanya, menambah gelombang ketakutan di antara warga sekitar.

Namun deretan tragedi ini tak berakhir. Pada Maret 2025, Mister, warga Desa Bepara, hilang setelah mandi di sungai. Basarnas dan masyarakat sekitar menyusuri sungai hingga tiga kilometer, namun upaya pencarian berakhir tanpa hasil. Tidak lama kemudian, seorang nelayan muda dari Desa Manunggul Lama, juga raib saat memancing. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi tempat penuh misteri dan rasa takut bagi warga setempat. Kisah-kisah ini menyoroti realitas pahit di balik ekspansi perkebunan sawit yang mengubah wajah alam dan mempersempit habitat buaya, memicu konflik yang kian tajam antara manusia dan satwa di Kotabaru.

Tak hanya buaya, fenomena lain muncul berupa kawanan monyet yang berkeliaran di jalan perkebunan kelapa sawit hingga masuk rumah warga. Fenomena ini adalah cermin dari deforestasi besar-besaran yang menghapus habitat alami mereka, memaksa satwa beradaptasi di kawasan manusia. Monyet yang sering dituding pencuri makanan sebenarnya berjuang bertahan hidup setelah kehilangan rumah hijau mereka.

Sejalan dengan peristiwa konflik yang meningkat, data BKSDA menyatakan konflik manusia dan buaya di Kalimantan Selatan semakin meningkat setiap tahun, dengan banyak kasus serangan yang menyebabkan korban luka hingga kehilangan nyawa. Akan tetapi, seringkali konflik satwa-manusia dianggap masalah ruang terbatas semata. Padahal, ini adalah potret gangguan keseimbangan ekosistem yang dihancurkan oleh pembangunan ekonomi yang sesaat tanpa memikirkan kelestarian. Pembangunan yang sejati harus melindungi tempat hidup spesies lain.



Polsek Hampang memasang peringatan tanda bahaya serangan buaya agar warga sekitar waspada berkegiatan di sungai

Di sisi lain, munculnya monyet yang berkumpul di pemukiman juga menciptakan keresahan sekaligus tantangan baru.

Bagi sebagian kalangan, perluasan perkebunan sawit dianggap sebagai berkah ekonomi yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, bagi warga yang hidup berdampingan dengan sungai dan hutan, ada harga mahal yang harus dibayar. Habitat satwa tergerus,

ruang jelajah satwa semakin menyempit, dan manusia harus hidup dalam bayang-bayang ancaman serangan satwa liar. Konflik antara manusia dan buaya.

Ini merupakan satu dari sekian gambaran persoalan besar mengenai keseimbangan ekosistem yang semakin terancam. Ekonomi dan ekologi seringkali berputar dalam dua timbangan yang berat sebelah. Sementara keuntungan ekonomi dari perluasan perkebunan sawit tampak nyata dan menggiurkan, kerugian sosial dan lingkungan jarang dihitung dengan serius. Setiap serangan satwa liar bukan sekadar angka statistik, melainkan duka mendalam bagi keluarga yang kehilangan dan memperdalam kesadaran mereka akan kerusakan yang terjadi pada alam sekitar.

Upaya mitigasi sangat dibutuhkan. Pemerintah hendaknya memperkuat wilayah konservasi dan membuat koridor satwa. Pengelolaan kanal dan sungai harus memperhatikan habitat alami satwa agar keseimbangan tidak terusik. Edukasi masyarakat tentang cara aman beraktivitas di wilayah rawan konflik menjadi kunci mencegah tragedi.

Krisis ekologis ini sebetulnya adalah panggilan keras dari alam kepada manusia untuk membayar utang ekologis yang telah lama tertunda. Hutan yang utuh bukan hanya rumah bagi buaya dan monyet, tetapi juga benteng penyangga kehidupan manusia. Jika kerusakan ini dibiarkan, bukan hanya satwa yang akan kehilangan tempat tinggal, tetapi manusia pun akan menghadapi bencana lingkungan dan sosial yang lebih besar. (*)



Sungai Mati, Harapan Pun Surut: Derita Nelayan dan Petani Tambak Pamukan

Putra Kotabaru

Di Pamukan, sebuah desa kecil di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sungai selama ini bukan hanya sekedar aliran air. Sungai adalah nadi kehidupan yang mensejahterakan masyarakat pesisir. Dari sungai itulah para nelayan mencari ikan, sedangkan para petani tambak bergantung pada airnya untuk membudidayakan ikan dan udang. Sungai adalah penopang ekonomi keluarga dan pusat kehidupan sosial yang mengikat komunitas Pamukan bersama.

Nelayan di Pamukan memiliki latar historis dan budaya yang kaya, yang berakar kuat dalam tradisi maritim dan kearifan lokal masyarakat pesisir. Secara historis, wilayah Kalimantan Selatan termasuk Pamukan merupakan bagian dari kawasan yang pernah diduduki oleh berbagai kerajaan dan kesultanan, seperti Kesultanan Banjar, yang sejak abad ke-17 memiliki hubungan perdagangan dan politik dengan kerajaan-kerajaan di wilayah

sekitar, termasuk Makassar dan Gowa. Penduduk di sekitar sungai dan pesisir telah lama mengandalkan perairan sebagai sumber penghidupan sekaligus menjadi pengikat sosial dan budaya komunitasnya.

Budaya nelayan Pamukan banyak dipengaruhi oleh migrasi masyarakat suku Bugis dari Sulawesi Selatan sejak abad ke-18. Orang Bugis dikenal sebagai pelaut ulung, pedagang, dan perantau yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka membawa tradisi pelayaran, perdagangan perahu layar, serta ritual budaya yang khas, seperti upacara Mappanretasi—ritual syukur atas rezeki dari laut yang masih dilaksanakan hingga kini di pesisir Kalimantan Selatan. Tradisi maritim ini bukan hanya soal menangkap ikan, tetapi juga terjalin dalam kehidupan sosial dan kultural yang kuat, termasuk seni tenun khas seperti tenun Pagatan serta nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi fondasi komunitas nelayan.

Namun kini, sungai yang dulu penuh kehidupan itu berubah menjadi sungai “hidup tanpa nyawa.” Air yang dulu jernih berubah keruh, ikan yang melimpah kini menghilang, dan hasil tambak pun menyusut drastis. Perubahan ini bukan tanpa sebab.

Rupanya, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang pesat di sekitar Pamukan membawa dampak buruk yang tak terelakkan. Pembukaan lahan yang mengorbankan hutan di bagian hulu menyebabkan erosi tanah besar-besaran. Sedimentasi lumpur mengisi sungai hingga air menjadi keruh dan dangkal. Parahnya lagi, limbah pupuk dan pestisida dari perkebunan sawit terbawa hujan, mencemari sungai dan menurunkan kadar oksigen di dalamnya. Ikan-ikan, yang dulu menjadi sumber penghasilan

utama, kini sulit bertahan atau mungkin telah berpindah ke tempat lain.

Mari kita tengok para nelayan yang dulunya mengandalkan sungai untuk mencari nafkah. Mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit: jaring-jaring yang tak lagi penuh ikan, hasil tangkapan yang menurun hingga nyaris kosong. Banyak di antara mereka yang terpaksa meninggalkan profesi warisan keluarga ini demi bekerja sebagai buruh tidak tetap di perkebunan sawit, tanpa jaminan kerja yang jelas. Kehidupan mandiri yang mereka jalani berubah menjadi ketergantungan pada sistem upahan yang tak menentu.

Nasib serupa dialami petani tambak. Air sungai yang selama ini mengairi tambak kini tercemar bahan kimia. Ikan dan udang yang mereka budidayakan mati sebelum bisa dipanen, korban dari keracunan limbah dan kekurangan oksigen. Hasil panen yang biasanya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat turun drastis hingga 60-70 persen. Biaya operasional membengkak karena mereka harus membeli bahan kimia tambahan dan sering mengganti air tambak, tetapi semua usaha itu belum cukup menutupi kerugian besar yang mereka alami. Banyak tambak akhirnya dibiarkan terbengkalai, dan keluarga mereka harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ancaman putus sekolah bagi anak-anak dan tumpukan hutang muncul di depan mata.

Lagi-lagi, di balik keuntungan yang meroket bagi perusahaan sawit dan pemasukan daerah, ada biaya ekologis dan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat kecil. Nelayan dan petambak Pamukan menjadi korban pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.

Mereka yang hidup dari sungai kini menderita karena sungai itu sendiri rusak. Para petambak berani turun ke jalan, menggelar demo meminta ganti rugi dan keadilan.

Kerusakan sungai akibat perluasan perkebunan sawit bukan sekadar masalah lingkungan. Ini adalah masalah keadilan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang paling bergantung pada alam justru menjadi korban pertama dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa keseimbangan hanya meninggalkan luka yang dalam. (*)



Buruh Perempuan dan Nyala Harapan

Yohanna ullu

Di antara hamparan hijau perkebunan kelapa sawit, berdirilah kaum perempuan dengan mimpi besar yang tak pernah padam. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kerasnya kehidupan buruh perempuan yang setiap hari bergelut dengan keringat, rasa lelah, serta ketidakadilan yang seakan sudah menjadi bagian dari rutinitas. Namun dari balik semua itu, para perempuan itu menyalakan api kecil yang perlahan tumbuh menjadi api keberanian. Keberanian untuk bermimpi, bersuara, dan mengubah keadaan. Para perempuan yang berdiri di antara para buruh di perkebunan sawit dengan mimpi membawa perubahan dan memberdayakan sesamanya di lingkungan kerja yang keras. Namun, bisakah impian itu menjadi kenyataan?

Beberapa buruh perempuan tak sekadar bekerja, melainkan mencoba menjadi sumber motivasi bagi sesamanya yang kerap memilih diam. Perempuan-perempuan perkebunan sawit seringkali memendam keluh kesah, menanggung beban ganda antara tuntutan kerja dan rumah

tangga, bahkan tak jarang menghadapi pelecehan yang sungguh menyakitkan. Banyak dari mereka takut bersuara, khawatir pada konsekuensi yang bisa datang kapan saja. Namun, ada juga yang hadir untuk mendengar, merangkul, dan meneguhkan keyakinan bahwa suara mereka punya arti besar bagi kemajuan.

Setiap pertemuan kecil, setiap percakapan sederhana di sela jam kerja atau perjalanan pulang yang melelahkan, menjadi ruang berbagi yang sarat harapan. Dari kisah tentang jemputan yang tak kunjung datang karena jalan rusak, tubuh yang gatal akibat pestisida tanpa perlindungan memadai, hingga cerita getir tentang pelecehan di kebun atau pertengkaran rumah tangga yang dipicu upah minimum, semuanya ia dengarkan dengan hati.

Air mata mereka sering kali jatuh tanpa disadari, bukan karena lemah, melainkan karena ia begitu larut dalam luka yang sama-sama mereka rasakan. Meskipun jalan ini penuh rintangan, Mereka yakin bahwa dengan keberanian dan tekad, perubahan bisa terjadi. Impian ini bukan hanya untuk sekedar keinginan pribadi, tetapi untuk semua perempuan yang menghadapi kerasnya kehidupan kerja di perkebunan sawit.

Namun, mereka pada suatu ketika tahu air mata saja tidak cukup. Keluhan yang terkumpul dibawa ke ruang-ruang dialog sosial, mereka suarakan di forum-forum bersama serikat buruh sawit, hingga aliansi. Banyak yang mereka pelajari dari kegiatan pembangunan kapasitas yang diadakan berbagai organisasi, mereka memperkuat diri sekaligus memperkuat kawan-kawannya seiring waktu.

Perlahan, mereka menyaksikan perubahan nyata dimana perempuan buruh sawit mulai dilibatkan dalam pelatihan

berkaitan pengenalan analisis gender dan hak-hak perempuan, advokasi dan materi penting lainnya, bahkan posko pengaduan dan rumah aman untuk korban kekerasan akhirnya diwujudkan.

Kini, senyum para perempuan tak lagi hanya menyembunyikan luka, melainkan juga tanda bahagia melihat mimpi yang perlahan menjadi nyata. Perjuangan masih panjang, tapi langkah sudah dimulai. Mereka percaya, setiap buruh perempuan berhak atas pengakuan, upah yang layak, cuti yang manusiawi, lingkungan kerja yang aman, dan perlindungan yang tak pernah ditawarkan. Ketika mereka melihat kawan-kawannya mulai menegakkan kepala, menolak kekerasan, dan menuntut hak yang seharusnya mereka miliki, hatinya penuh dengan rasa syukur. Perjuangan panjang itu mulai berbuah.

Cerita ini bukan hanya tentang kisah pribadi, melainkan tentang semua perempuan di perkebunan sawit yang memilih untuk tidak menyerah. Tentang mereka yang belajar untuk menuntut hak mereka, berani bersuara, dan meyakini bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan, betapapun berat jalannya. Dan di perkebunan kelapa sawit yang penuh keringat dan tangis itu, mulai terlihat bahwa mimpi seorang perempuan bisa menjadi jalan bagi ribuan langkah menuju masa depan yang lebih adil. (*)



Dari Kebun ke Kelas: Melangkah Raih Ilmu, Menangkan Keterbatasan

Debora Simanullang



(Kredit: Debora)

Anak-anak sekolah Kotabaru, Kalimantan Selatan harus berjalan kaki jauh setiap pulang manakala bus sekolah tidak tersedia. Perjalanan panjang ini menjadi bagian dari perjuangan mereka menuntut ilmu.

Di tengah hamparan luas perkebunan sawit, berdirilah sederet rumah sederhana yang menjadi tempat tinggal para pekerja kebun dan keluarganya. Mereka hidup berdampingan berbagi ruang dan cerita di lingkungan kebun dengan listrik yang menyala

hanya berkat genset, serta pasokan air seadanya dari perusahaan. Di kompleks kebun inilah tumbuh banyak anak-anak yang giat bersekolah, tinggal bersama orang tua yang mengais rezeki dari kerasnya dunia perkebunan.

Setiap hari dimulai sangat pagi. Ketika jarum jam baru menunjuk pukul empat dan lampu perlahan menyala, para ibu sudah terjaga dan mengolah bahan pangan. Tak lama berselang, tepat pukul lima, giliran anak-anak dibangunkan. Mereka pun bersiap, mandi, mengenakan seragam, mengecek perlengkapan sekolah, dan menyantap sarapan sederhana.

Tiap pagi, tepat pukul enam, para pekerja kebun bersama pasangan dan anak-anak mereka serentak meninggalkan rumah. Orang tua bergegas ke kantor divisi untuk apel pagi sebelum turun ke lahan sawit, sementara anak-anak menuju pondok kecil di pemukiman menanti bus sekolah. Jarak sekolah yang harus ditempuh sekitar 6–8 km dari perumahan, sebab perusahaan tidak menyediakan fasilitas SD, SLTP, maupun SLTA di lingkungan kebun. Meski jauh dan penuh keterbatasan, keluarga-keluarga ini tetap semangat mengantar anak-anak mengejar pendidikan.

Bus sekolah ini akan berkeliling menjemput anak-anak buruh sawit dari berbagai divisi, menempuh jarak yang berbeda-beda. Meski hanya ada satu bus dengan kapasitas terbatas—sering kali penumpang penuh hingga sebagian harus berdiri—anak-anak tetap berangkat sekolah dengan semangat dan wajah ceria.

Anak sekolah dari tingkat SD, SLTP, hingga SLTA, sekitar 30 orang diangkut setiap hari. Bus berangkat pukul 06.15 pagi dan tiba di sekolah pukul 07.15, memberi waktu bagi anak-anak untuk bersiap sebelum pelajaran dimulai pukul 07.30 dan

pulang pada pukul 13.00 siang. Bagi mereka, perjalanan panjang dan sarana terbatas bukanlah alasan untuk menyerah mengejar ilmu. Setelah selesai mengikuti pelajaran, anak-anak sekolah menunggu di halte bus di sekolah hingga bus sekolah dari kebun tiba untuk menjemput mereka pulang. Di Divisi 1, anak-anak tiba di perumahan sekitar pukul 14:15, sedangkan di Divisi 2 sekitar pukul 14:45. Inilah rutinitas sehari-hari anak-anak buruh kebun sawit, berangkat dan pulang sekolah demi mengikuti pelajaran meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas.



Mobil jemputan anak sekolah dengan kondisi yang jauh dari kategori aman.

Perjalanan menuju sekolah tidak selalu mulus bagi anak-anak buruh perkebunan sawit. Ketika musim hujan datang dan turun deras selama beberapa hari berturut-turut, jalan utama yang mereka lalui sering terendam banjir hingga tak bisa dilewati bus sekolah. Kondisi ini membuat anak-anak terpaksa absen selama 2-3 hari sampai air surut dan bus dapat beroperasi kembali.

Ketidakhadiran mereka di sekolah tentu saja berakibat pada ketinggalan pelajaran, sementara orang tua hanya bisa

mengirimkan izin melalui pesan singkat WhatsApp. Situasi ini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi demi terus menapaki jalan pendidikan.

Saat pulang sekolah, tantangan baru juga menanti anak-anak buruh kebun sawit. Meski pagi hari mereka bisa berangkat dengan bus, saat hujan dan jalan mulai banjir, bus tak bisa menjemput mereka. Orang tua pun harus menjemput dengan sepeda motor, melewati genangan air licin yang sulit dilalui. Tak jarang, ada yang menumpang sepeda motor orang tua teman, atau jika kondisi jalannya rusak parah, anak-anak harus berjalan kaki melewati jalan yang banjir dengan seragam dan sepatu basah.

Saat mobil sekolah rusak sehingga tidak bisa mengantar anak-anak, peran orang tua semakin besar. Selain menjalankan tugas di perkebunan, mereka juga harus mengantar anak-anaknya ke sekolah menggunakan sepeda motor. Setelah mereka mengikuti apel pagi di divisi masing-masing, mereka mengantarkan anak, kemudian kembali bekerja, mulai dari memanen buah, memuat tandan buah sawit, memupuk, menyemprot dan beragam tugas lainnya. Meski pekerjaan fisik menguras tenaga, para orang tua ini tak pernah mengeluh demi memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Pada pukul 13.00 siang, para orang tua harus menghentikan pekerjaannya, meskipun belum selesai, untuk menjemput anak-anak mereka dari sekolah. Dengan pakaian kotor dan basah karena keringat setelah bekerja, mereka bergegas menjemput dan mengantar anak-anak pulang ke rumah. Setelah anak-anak sampai di rumah, orang tua kembali ke kebun untuk melanjutkan aktivitas.

Kadang kala, jika orang tua tidak dapat menjemput, anak-anak berinisiatif berjalan kaki dan menaiki truk atau mobil yang melintas untuk mendapatkan tumpangan agar bisa sampai di rumah masing-masing dengan selamat.

Perjalanan bersekolah, bertahan dengan akses transportasi, listrik dan air terbatas—adalah sekelumit kisah perjuangan anak-anak buruh perkebunan sawit untuk meraih pendidikan. Meski harus menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan, semangat mereka tak pernah pudar. Dengan dukungan dari orang tua yang terus berharap anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi, mereka tetap berusaha belajar demi masa depan yang lebih baik. Impian besar orang tua di kebun sawit adalah melihat anak-anaknya menggapai cita-cita dan mendapat kehidupan yang layak berkat pendidikan dan pengetahuan yang diperjuangkan setiap hari. (*)

Epilog: Refleksi Kolektif

Buku ini ditutup, tetapi kenyataan yang diceritakan di dalamnya masih terus berlangsung. Apa yang dialami buruh sawit di Kalimantan Selatan—ketidakadilan kerja, kerentanan hidup, dan bencana ekologis—bukanlah peristiwa yang terpisah-pisah, melainkan rangkaian pengalaman yang saling terkait dan membentuk satu gambaran krisis utuh.

Tidak ada solusi instan yang ditawarkan dalam buku ini. Ia justru mengajak pembaca untuk berhenti sejenak, memahami bahwa krisis yang kita hadapi hari ini adalah hasil dari sejarah panjang dominasi kapitalisme, yang mengabaikan keseimbangan hidup. Ketika perburuan dipisahkan dari lingkungan, ketika pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, buruh dan alam dipaksa menjadi komoditas dan saling menanggung beban.

SERBUSAKA lahir dari kesadaran bahwa perjuangan buruh tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Serikat buruh menjadi ruang untuk merajut solidaritas, berbagi pengetahuan, dan membangun daya tawar—bukan hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap cara pembangunan yang menyingkirkan manusia dan alam sekaligus.

Dari rumah perjuangan yang sederhana hingga advokasi kebijakan, SERBUSAKA menegaskan bahwa buruh sawit adalah subjek penting dalam perbincangan keadilan sosial dan ekologis. Melalui kisah buruh yang berjuang mencari nafkah di kebun sawit, pemanen yang bekerja di tengah cuaca ekstrem, buruh perempuan yang berjuang, warga yang berkonflik dengan buaya dan monyet, nelayan yang kehilangan sungai, hingga buruh yang berorganisasi dalam SERBUSAKA, buku ini menunjukkan bahwa krisis ekologis memiliki wajah manusia. Alam yang rusak selalu memukul paling keras mereka yang paling dekat dengannya. Di perkebunan sawit, buruh tidak sekedar bekerja, tetapi juga memperjuangkan kesehatan, keselamatan, bahkan nyawa. Dalam situasi ini, buruh sawit berpikir, merasakan, dan melawan—dengan cara mereka sendiri.

Dalam refleksi ini juga terkandung harapan besar untuk perubahan yang lebih berpihak pada buruh dan lingkungan hidup. Para penulis mengingatkan bahwa tata kelola sawit yang berkelanjutan harus melibatkan perlindungan buruh secara utuh. Pemenuhan hak-hak buruh, baik melalui regulasi dan berjalannya peran pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak buruh serta kepatuhan dan perilaku korporasi untuk menghormati HAM menjadi kunci agar perbaikan tidak sekedar wacana, tetapi nyata di lapangan.

Lebih jauh, kumpulan tulisan ini adalah awalan, merupakan seruan kuat untuk mempererat solidaritas lintas sektor, baik di dalam komunitas buruh, antara serikat pekerja, lembaga advokasi, hingga kolaborasi dengan para aktivis HAM, aktivis lingkungan dan pembuat kebijakan. Soliditas ini penting demi membangun daya tawar dan memperkuat perjuangan bersama agar suara buruh tidak hanya didengar, tetapi juga direspons.

Refleksi kolektif dalam buku ini adalah pengingat bahwa masa depan yang adil tidak bisa dibangun dengan mengorbankan mereka yang paling rentan. Keadilan bagi buruh sawit harus berjalan seiring dengan pemulihan ekologi. Merawat kehidupan berarti merawat hubungan antara manusia, tanah, air, hutan, dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya.

Semoga buku ini tidak berhenti sebagai dokumentasi, tetapi menjadi bagian dari ingatan bersama dan pijakan untuk tindakan nyata. Sebab selama ketidakadilan dan kerusakan masih berlangsung, suara buruh sawit harus terus didengar dan perjuangan harus terus disambung.

